



Volume 01  
MEI 2024

# KOMPONEN 1 KEMENDAGRI BULETIN P3PD RIAU



## P3PD ISSUE

- LMS PAMONG DESA
- PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
- POJOK PERATURAN DAN REGULASI DESA
- MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELATIHAN P3PD
- POTRET KEWIRAUSAHAAN DESA – KUNJUNGAN KE DESA RUMBAI JAYA



### LMS PAMONG DESA , UJI COBA MENANDAI ERA PEMBELAJARAN DIGITAL APARATUR DESA DIMULAI

Tgl 03 Mei tahun 2024 telah dilakukan uji coba program pembelajaran digital aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa LMS Pamong Desa.



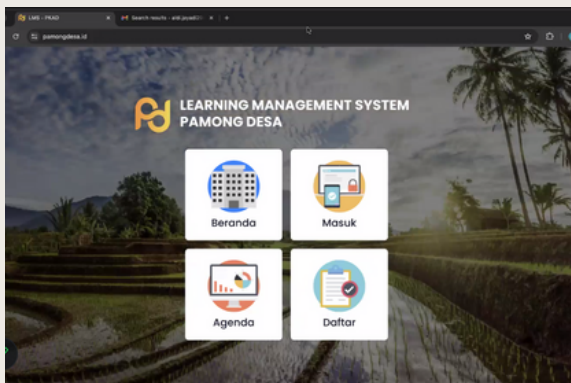
Kegiatan ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan diikuti oleh peserta dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, Pengembang, Pemerintahan daerah dan konsultan tingkat pusat dan konsultan tingkat regional.

<http://p3pd-riau.com>

## LMS PAMONG DESA, SOLUSI PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI ERA TEKNOLOGI DAN GLOBALISASI

Pola pembelajaran digital memang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya kapasitas pengelolaan dana desa di Indonesia. Pola pembelajaran digital memungkinkan untuk terjadinya transfer pengetahuan. tanpa terpengaruh sebaran jarak dan biaya yang mahal.

Tahun 2024 Riau akan melaksanakan pelatihan digital pada 872 desa yang tersebar di 9 kabupaten yang ada di Riau. Diharapkan pemerintahan desa mulai memantapkan persiapan di desa agar pada saat kegiatan berlangsung tidak banyak ditemui hambatan dan kendala yang dapat merugikan peserta pelatihan di desa



# PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA



**SEKSES DI TAHUN 2023, P3PD RIAU DAPATKAN LAGI KUOTA PELATIHAN TATAPMUKA UNTUK 144 DESA**

Setelah berhasil melaksanakan pelatihan untuk 1281 desa, tahun 2024 ini P3PD Riau akan kembali melaksanakan pelatihan Tatapmuka kepada desa-desa yang belum diundang pada pelatihan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa di tahun 2024.

Materi yang dilatihkan pada pelatihan kali ini berbeda dengan pelatihan di tahun lalu. Jika tahun lalu terdapat tujuh jenis pelatihan, untuk tahun ini hanya diberikan pelatihan aparatur desa dasar tanpa ada pelatihan tematik.

## Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

188 desa di Provinsi Riau berkesempatan untuk melakukan pelatihan tatapmuka di tahun ini. Seluruh peserta yang hadir nantinya akan mendapat pelatihan mengenai kewirausahaan desa, kepemimpinan, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa dan lain-lain.



## Tingkatkan kapasitas sumberdaya pembangunan desa

Pelatihan tatap muka P3PD akan dihadiri oleh peserta dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan PKK atau perwakilan dari LKD yang ada di Desa. Diharapkan dengan dilatihnya empat unsur ini akan terjadi kesamaan cara pandang dan kesepemahaman konsep sehingga terjadi perbaikan dalam perencanaan pembangunan desa yang pada akhirnya tercapai peningkatan kualitas belanja desa.



# POJOK PERATURAN DAN REGULASI DESA



## MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BERDAULAT DAN OTONOM MELALUI EKSTISTENSI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dalam berbagai kesempatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan team P3PD Provinsi Riau didapati bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa masih belum Maksimal. BPD masih menganggap bahwa peran mereka hanyalah sebagai bagian dari legitimasi terlaksananya penyelenggaraan kegiatan desa, selain itu produk hukum yang inisiasi oleh BPD juga sangat minim sekali, biasanya Perdes yang ada di desa masih perdes yang wajib ada berkaitan dengan pencairan anggaran desa. Selain itu sangat sedikit ditemui dilapangan BPD yang memiliki arsip terkait penggalan aspirasi masyarakat dan laporan kinerja BPD.

Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati mengenai BPD sudah seharusnya mempertimbangkan hal-hal berikut;

**Penguatan Organisasi**, Sebagai sebuah lembaga, BPD belum dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari segi hal yang paling elementer, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Padahal secara substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja tidak sistematis dan alakadarnya. Dari keseluruhan BPD yang ditemui, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja. Lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Selain itu sebagai sebuah lembaga BPD tidak memiliki kantor bahkan banyak yang menumpang berkantor di kantor desa. Sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Kepala Desa hal ini bisa berdampak pada subjektivitas BPD tidak lagi bekerja secara profesional.

**Mekanisme Hak Bagi BPD**, perlu juga mempertimbangkan issue kesenjangan dan kesejahteraan bagi BPD. Pendapat yang mengemuka beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding yang diterima oleh Kepala Desa

### **Penguatan Kapasitas BPD**

Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan tugas dan fungsinya. Sebut saja misalnya dalam fungsinya sebagai pembahas ranperdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun dalam kenyataannya sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan perdes lebih banyak berasal dari keplaa desa



## MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELATIHAN

Kegiatan utama Team P3PD Provinsi Riau Bulan Mei 2024 adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan yang di laksanakan selama 1 bulan. team monitoring dan evaluasi yang terdiri dari sepuluh tenaga ahli dari Regional Management Consultan untuk Provinsi Riau, menyambangi 62 desa yang tersebar di 9 kabupaten.

Dari 1281 desa yang telah diundang sebagai peserta pelatihan di tahun 2023, dipilih 62 desa. Di akhir kegiatan Seluruh desa yang dijadikan target pelatihan telah selesai dilaksanakan proses evaluasi dengan total 206 peserta yang hadir pada kegiatan ini.



## Hasil Evaluasi sangat memuaskan

Berbagai kemajuan dapat kita rasakan di desa-desa yang telah kita kunjungi, mulai dari perencanaan pengembangan BUMDes yang lebih profesiaonal hingga pelaksanaan tupoksi para alumni Pelatihan P3PD yang semakin mengarah kepada perbaikan.



## P3PD Riau tidak berpuas diri

meskipun terdapat perbaikan disana-sini, namun masih banyak kekurangan yang kita rasakan di desa, misalnya seperti masih ditemui BPD yang tidak memiliki laporan kinerja, PKK yang tidak memiliki perencanaan.



LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

# Belajar dimana saja, kapan saja

P3PD MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

# POTRET KEWIRAUSAHAAN DESA



## BUMDESA LANCANG KUNING DESA RUMBAI JAYA



Team P3PD Provinsi Riau berkunjung ke Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir pada petengahan bulan Mei tahun 2024. pada kesempatan kali ini team P3PD Provinsi Riau memotret aktifitas dari BUMDes Lancang Kuning desa Rumbai Jaya yang di tahun 2022 lalu dinominasikan sebagai 10 Bumdes terbaik di Riau. pada kegiatan musyawarah Desa Pertanggungjawaban tahunan diketahui total laba yang didapat dari seluruh unit usaha adalah sebanyak 142 juta untuk tahun 2023.

Unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Lancang kuning adalah bidang peternakan yaitu pengembangbiakan hewan ternak jenis Sapi, kemudian bidang UMKM mengembangkan usaha pembuatan gula aren dan gula semut, selain itu di bidang pertanian BUMDes mendirikan unit usaha Saprodi yang menyediakan berbagai macam pupuk dan pestisida. Tahun ini pemerintahan desa Rumbai Jaya akan menambahkan anggaran penyertaan modal untuk meningkatkan hasil penjualan di unit usaha jual beli kebutuhan pertanian dengan menambahkan jenis barang dagang berupa peralatan pertanian.

Mulyono yang merupakan Ketua BUMDesa Lancang kuning mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat 600 ekor sapi yang ditenakkan dengan sistem inseminasi buatan. Keberhasilan BUMDes tidak lepas dari dukungan pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat. Pola kemitraan yang dibangun oleh BUMdes dengan bagi hasil keuntungan penjualan 60 % untuk kelompok masyarakat dan 40 % untuk BUMDes dinilai berhasil membangun antusiasme dan semangat masyarakat sehingga ikut serta mengembangkan BUMDes melalui kelompok kelompok peternak.



Keistimewaan BUMDes Lancang Kuning adalah bagaimana Pengurus BUMDes benar benar membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta maju bersama - sama dengan pola pemberdayaan dan pembinaan. salah satu bentuk pembinaan itu ialah dengan menyediakan modal bagi masyarakat yang memiliki ketertarikan dan ingin mengembangkan usaha ternak sapi.